

Kita Tetap Cari Solusi Taksi

► Hari Ini FKPD Rapat Kisruh Taksi Online di Engku Putri

BATAM, TRIBUN - Keributan antara taksi konvensional dengan online memaksa pemerintah berpikir keras mencari solusi. Pasca ribut Senin

(12/3) malam lalu di jalan Duyung, Batuampar, hari ini Rabu (14/3) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Batam kembali rapat. Agen-

danya yakni mencari solusi persoalan taksi.

"Rapat dipimpin Wali Kota Batam, semua stakeholder diundang," kata

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri kepada Tribun. Se-

• ke halaman 7

KESEPAKATAN RAPAT

- Pemko Batam, Pemprov dan FKPD mewajibkan aplikator untuk menerima seluruh taksi plat kuning yang layak beroperasi untuk bergabung ke aplikasi.
- Aplikator dan Asosiasi Driver Online (ADO) menseleksi keanggotaan Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan kuota. (Sementara kuota 300 unit)
- Aplikator tidak boleh melakukan perekrutan driver online baru
- Penambahan kuota akan diberikan oleh Dishub Kepri setelah ada kajian dari konsultan

Kapolres : Taksi Konvensional Tetap Kita Masuk Online Tilang

SUDAH ada empat poin kesepakatan mengenai kisruh moda transportasi di Batam. Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki menyampaikan agar kedua

• ke halaman 7

TAKSI konvensional akan menjadi bagian dari taksi berbasis aplikasi. Setidaknya itu menjadi satu diantara poin pembahasan dalam rapat angkutan sewa khusus bertempat di lantai IV Gedung Wali Kota Batam, Rabu (14/3).

• ke halaman 7

"Konvensional nanti akan menjadi bagian dari taksi online. Solusi ini menjadi bagian jalan tengah atas keributan yang terjadi saat ini," kata Wakil Wali Kota Batam, Am-sakar Achmad, usai rapat

INVESTOR MANA BERANI LAGI MASUK

13

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri menolak kata sepakat dalam penentuan UMSK Batam yang terjadi pada rapat DPK terakhir. Menurut Apindo, yang ada adalah pemaksaan kehendak. Apindo terpaksa akan mengambil langkah-langkah hukum berkaitan dengan penentuan UMSK ini kelak oleh Gubernur Kepri.



Taksi Konvensional

pembahasan tersebut.

Dia optimistis, keputusan itu bisa menjadi terobosan dalam menyelesaikan kisruh taksi online dan konvensional di Batam. Sebab persoalan yang terjadi saat ini, kendatipun sudah digelar rapat beberapa kali untuk penyelesaian transportasi di Batam, namun di lapangan perusahaan aplikasi masih saja merekrut anggotanya. Sedangkan untuk menutup aplikasi ini, menjadi kewenangan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan di pemerintah provinsi atau kota. "Harus ada ketegasan dari Kementerian Kominfo. Maka solusinya, aplikator harus bersedia mengakomodir taksi konvensional," ujarnya.

Amsakar menilai, dengan wacana beralihnya taksi konvensional menjadi taksi berbasis aplikasi ini, mau tak mau membuat taksi-taksi lama "tua", juga ikut mulai berbenah diri, mengikuti kondisi yang ada saat ini. Tentu saja juga tetap berpedoman pada aturan yang ada.

Dalam rapat itu, manajemen dari tiga perusahaan aplikasi seperti Go Car, Uber dan Grab hadir. Amsakar menilai, jalannya rapat siang itu juga sudah mengarah pada terjalannya komunikasi yang lebih baik, antara taksi online dan taksi konvensional.

Amsakar tak memungkir, kisruh transportasi yang terjadi di Batam saat ini sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan yang ingin

datang. Di satu sisi Pemerintah Kota Batam ingin membenahi infrastruktur. Begitu juga mendorong agar even-even nasional bisa diselenggarakan di Batam, dengan harapan dapat menggenjot kunjungan wisatawan yang datang. Di sisi lainnya, malah terjadi bentrok di lapangan berkenaan dengan transportasi.

Gesa Izin

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri menargetkan, izin prinsip atas badan usaha yang mengajukan izin angkutan sewa khusus di Batam, bisa keluar pekan depan. Saat ini ada 16 badan usaha yang mengajukan izin angkutan sewa khusus ke Dishub, namun yang lengkap berkasnya baru empat badan usaha.

"Yang belum lengkap kita usahakan dalam minggu ini supaya bisa lengkap. Sehingga provinsi bisa keluar izin prinsipnya," kata Kepala Dishub Provinsi Kepri, Jamhur Ismail, Rabu (14/3) di lantai IV Gedung Wali Kota Batam.

Selanjutnya, ke-16 badan usaha yang bergerak di bidang angkutan itu, diminta mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, seperti kendaraannya mesti diuji KIR. Kemudian tahapan lainnya, hingga diterbitkan izin usaha angkutan. "Target saya minggu depan, badan usaha yang sudah lengkap berkasnya sudah bisa dikeluarkan izin prinsipnya," ujarnya.

pelanggaran tidak memenuhi persyaratan tetap akan kita lakukan tindakan yang melanggar aturan berlalulintas. Seperi izin yang belum dikeluarkan itu," sebutnya.

Pihaknya tetap meminta dengan tegas, agar kedua belah pihak tidak melaku-

Sambungan Hal.1

Jamhur membenarkan, dalam rapat sesi pertama di-sepakati kuota untuk taksi online sebanyak 300 unit. Selanjutnya kuota ini akan dibagi sama rata untuk 16 badan usaha yang sudah mengajukan izin angkutan sewa khusus ke Dishub Provinsi Kepri. Sesuai Permenhub itu, nantinya taksi online yang beroperasi juga akan diberikan tanda khusus, semisal plang, dan lainnya. Lantas bagaimana jika di lapangan lebih dari 300?

"Di luar 300, berarti taksi online yang beroperasi itu ilegal. Kalau ilegal harus dilaksanakan penindakan hukum oleh kepolisian," kata Jamhur.

Senin depan, Dishub Kepri akan mengadakan rapat lanjutan mengenai penentuan tarif serta zonasi. Rencananya rapat itu juga akan mengundang perusahaan aplikasi, sehingga bisa dibuatkan MoU-nya.

"Penetapan zonasi ini akan digelar di Tanjungpinang, rencananya Senin. Nanti kita rumuskan itu. Contoh tidak boleh jemput di bandara. Nah di sana ada radiusnya, berapa meter dari bandara atau pelabuhan. Kalau tadi belum ada pembahasan itu, hanya secara umum saja," kata Jamhur.

Nantinya soal zonasi ini juga akan dibicarakan dengan taksi konvensional. Sehingga ada titik temu. Namun terlebih dahulu, Dishub akan berkomunikasi lebih detail dengan badan usaha yang sudah mengajukan izin angkutan sewa khusus. (wle)

Sambungan Hal.1

Komo meminta kepada taksi berbasis aplikasi untuk mengikuti keputusan rapat. "Dan kami juga sampaikan kepada mereka yang belum mendapatkan izin, jangan merasa sudah punya izin, dan seenaknya beroperasi. Jelas itu tidak mengikuti

Buat Saja

taksi konvensional. Sekatng saja taksi, sama angkot kita lihat masih prihatin cari penumpang. Karena orang lebih suka naik motor," katanya, Rabu (14/3).

Berkaca dari berbagai daerah, kisruh antara taksi online dan konvensional cukup mengkhawatirkan. Hal tersebutlah yang tidak diinginkan terjadi di Kota Tanjungpinang.

Sementara itu, Reni Anggota DPRD Kota Tanjungpinang mengatakan kehadiran taksi online memang tidak

Kita Tetap

lisa (13/3).

Termasuklah di dalamnya Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Ketua DPRD Kota Batam, Kapolresta Bareleng, Dandim, Danlanal, marinir, asosiasi driver online, forum taksi Kota Batam, dan pihak terkait lainnya. "Intinya kita tetap ingin mencari solusi penyelesaian taksi online di Batam," ujarnya.

Yusfa berharap, dalam rapat tersebut manajemen aplikasi yang berkantor pusat di Jakarta, bisa hadir. Sehingga bisa ikut bersama-sama mencari solusi terhadap penyelesaian kisruh transportasi di Batam.

Lebih lanjut, Yusfa menilai, sejauh ini pertikaian yang terjadi terkait transportasi itu masih murni antara kedua belah pihak, taksi online dan taksi konvensional. Dia tidak ingin persoalan di lapangan sampai melebar ke mana-mana.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan akan segera membahas permasalahan moda transportasi di Batam. "Saya akan membahas masalah tersebut secepatnya. Karena itu, hari ini saya pergi ke Batam untuk membicarakannya," kata Nurdin.

bisa dielak. Setring dengan perkembangan teknologi, hal tersebut pasti akan menjadi kebutuhan masyarakat.

"Soal regulasi tentu ada aturannya. Tapi yang terpenting saya kira momen ini harus dimanfaatkan taksi atau angkot yang ada saat ini untuk berbenah. Meningkatkan pelayanan," katanya.

Menurutnya, taksi online atau angkutan kota bisa memberikan pelayanan yang baik dengan plus-plus. Sehingga meskipun harganya atau tarifnya mahal, namun

Menurut Nurdin, kehadiran angkutan sewa khusus berbasis aplikasi atau taksi online merupakan sebuah tuntutan zaman. Karena itu, keberadaan moda transportasi tersebut harus diterima oleh masyarakat.

"Kita tidak bisa menolaknya. Itu tuntutan zaman. Makanya saya minta sopir taksi konvensional agar perlahan-lahan memakad aplikasi online," anjur Nurdin.

Dia menegaskan, selagi para sopir taksi konvensional tidak berupaya mengikuti perkembangan zaman maka mereka akan digilas oleh kemajuan teknologi. Mereka juga akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Kondisi demikian akan memicu permasalahan berkepanjangan.

"Nanti masalah muncul lagi, semuanya diserahkan kembali kepada Pak Gubernur. Nah, karena itu kita harus berusaha mengikuti tuntutan zaman," ungkap Nurdin.

Instruksi khusus

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Jamhur Ismail tidak bisa hanya diam saja dan menonton lagi permasalahan moda transportasi di kota Batam.

pengguna jasa angkutan mendapatkan kepuasan.

"Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada taksi konvensional. Kalau pelayanan bagus pelanggan yang menggunakan puas taksi online tak diperlukan," katanya.

Bahkan menurutnya, taksi konvensional di Tanjungpinang juga bisa membuat aplikasi khusus online di Kota Tanjungpinang. Sehingga selain konvensional mereka juga bisa bertransformasi menjadi taksi online.

Dia mendapat instruksi khusus dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk segera menyelesaikan permasalahan transportasi yang sudah berulang kali mengakibatkan kisruh antarsopir taksi dan konvensional. "Saya tadi diperintahkan khusus oleh Pak Gubernur untuk berangkat ke Batam untuk membahas permasalahan taksi," kata Jamhur.

Jamhur kemudian menggelar rapat terbatas dengan wali kota Batam Muhammad Rudi, Kepala Dishub Kota Batam Yusfa Hendri dan beberapa pejabat lainnya. Dalam rapat tersebut, mereka merancang persiapan untuk menggelar rapat bersama pada Rabu (13/3).

Rapat bersama tersebut sebenarnya dipimpin oleh Nurdin sendiri. Namun, karena gubernur harus terbang ke Jakarta untuk mengikuti rapat lainnya, maka posisinya diganti oleh Sekdaprov Kepri Arif Fadillah. Rapat bersama ini akan dihadiri oleh perwakilan semua elemen baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola taksi dan aplikator.

"Pak Sekdaprov sendirlah yang memimpin rapat tersebut mewakili Pak Guber-

Sambungan Hal.1

"Buat saja aplikasi online taksi-taksi konvensional ini. Untuk lokal saja Tanjungpinang. Jadi orang mau masuk di Tanjungpinang sudah ada yang konvensional online," katanya.

Karena menurutnya, taksi online tentu dibutuhkan masyarakat kita. Meskipun dalam waktu dekat belum ada taksi online di Pinang. Namun kedepan tidak menutup kemungkinan ada yang masuk, bila tidak ada taksi yang berbasis aplikasi di Tanjungpinang. (Iwn)

Sambungan Hal.1

nur. Rapat berlangsung di ruang rapat utama kantor Wali Kota Batam pada Rabu pukul 10.00 WIB," ungkap Jamhur.

Kepala (Dishub) Kepri ini memastikan akan memaparkan poin-poin penting dalam mengatasi permasalahan alat transportasi di kota Batam. Pemaparan tersebut terfokus pada permasalahan seputar kisruh taksi online dan konvensional dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Jamhur kemudian menjelaskan, taksi Online mulai beroperasi di Batam pada Maret 2017. Sejak saat itu, keributan antara pengemudi taksi online dengan pengemudi taksi konvensional mulai pertengahan 2017 sering terjadi hingga saat ini.

"Aplikator memberikan layanan akses aplikasi kepada orang-orang sebagai penyedia jasa angkutan memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Seluruh taksi online belum memiliki izin penyelenggaraan," kata Jamhur menyebutkan garis besar permasalahan taksi online di Batam. (wle/tom)

7.000 Kendaraan Nunggak Pajak

▶ Samsat Belum Bisa Tarik Rp 16 Miliar



Riko Juniandy

BATAM, TRIBUN - Razia kendaraan bermotor yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang, bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), mengamankan belasan mobil dan puluhan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat.

Bahkan ada pemilik STNK mobil yang meninggalkan STNK dan berlalu pergi membawa kendaraannya. Ada juga beberapa pengendara yang berusaha mendekati polisi agar mobil dan

motor kendaraan mereka dilepaskan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Batuaji, Riko Juniandy mengatakan saat ini untuk daerah Batuaji dan Sagulung, kurang lebih 7.000 ribu unit kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya.

Sementara untuk kendaraan roda empat jumlahnya juga lumayan banyak didominasi mobil lori, dan kendaraan pribadi yang sudah tua dan tahun lama. "Tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk daerah Batuaji dan Sagulung kurang lebih Rp 16 miliar," kata Riko.

Azman Berharap Batam Jadi Tuan Rumah

► Skill Competition 2019 Bisa Dongkrak Wisatawan

BATAM, TRIBUN - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Batam meraih juara 3 kategori Leader Pitching di ajang Skill Competition Pemadam Kebakaran. Event nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini, berlangsung tanggal 26-28 Februari lalu bertempat di Ambon, Maluku. Kegiatan dilakukan dalam rangka memeriahkan ulang tahun Damkar yang ke-99 tahun.

Kepala Dinas Damkar Kota Batam Azman mengatakan, tahun ini merupakan tahun ketiga anggotanya ikut berpartisipasi pada ajang tahunan tersebut. Setiap tahunnya, Damkar Kota Batam selalu pulang menorehkan prestasi.

"Setiap tahun kita ikut dan raih prestasi. Tahun ini kita dapat juara tiga leader pitching, penyelamatan korban di bangunan gedung dengan

menggunakan tangga dan tali. Kecepatan, kekompakan tim diperlukan," kata Azman usai upacara di Dataran Engku Putri Batam Center.

Sementara dua tahun lalu, dan tahun sebelumnya, Damkar meraih juara dua untuk kategori Hose Laying.

"Tahun ini kita turunkan 15 anggota, tiga tim. Semua kategori kita ikuti dari survival, leader pitching, hose

laying, tapi tahun ini kita dapat yang di leader pitching. Pesertanya banyak. Hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia, kalau tak salah 68 peserta," ujarnya.

Atas torehan prestasi ini, Azman berharap bisa semakin memacu semangat anggotanya di lapangan dalam bekerja. Untuk ajang ini sendiri, pihaknya melakukan latihan lebih kurang satu bulan kepa-

da anggota yang terpilih.

"Ya yang jelas semakin memacu semangat. Tadi kita serahkan piala ke wali kota. Semoga tahun depan kita berprestasi lagi," kata Azman.

Apalagi penyelenggaraan ajang Skill Competition 2019 mendatang, Sumatera akan menjadi tuan rumah penyelenggaraannya. Azman berharap, Batam, Kepri bisa jadi tuan rumah. **(wie)**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN
Jalan Pramuka No. 112 Tanjung Balai Karimun
Telp. (0777) 327267-327420 Fax. (0777) 327421

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT No.4 Tahun 1996, terhadap barang-barang obyek lelang milik debitur/penjamin hutang, sebagai berikut:

No	Obyek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan penawaran lelang (Rp)
1	Sebidang tanah kosong seluas 15.340 m2 terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun (SHM No. 2/Darussalam tanggal 28 November 2002 a.n. 1. TJJO SIN REN dan 2. HENNY CECILIA)	700.000.000.-	140.000.000.-
2	Sebidang tanah seluas 293 m2 berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun (SHM No. 52/Gemuruh tanggal 25 Oktober 2007 a.n. M. ARFA)	120.000.000.-	24.000.000.-
3	Sebidang tanah seluas 2.906 m2 berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Ujung Batu Kelurahan Teluk Badang, Kecamatan...		

AN KEDUA
HAK TANGGUNGAN

ning Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Undang

Investor Mana Berani Lagi Masuk

- ▶ Apindo akan Tempuh Jalur Hukum
- ▶ Tolak Penentuan Upah Minimum Sektoral

BATAM, TRIBUN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri menolak kata sepakat dalam penentuan UMSK Batam yang terjadi pada rapat DPK terakhir. Yang ada adalah pemaksaan kehendak. "Kami rapat dalam tekanan demo ribuan pekerja,

lalu dipaksa voting dengan pengusaha melawan serikat dan Pemko. Ya jelas kalah. Kami hanya bisa terima nasib," kata Ketua Apindo Kepri, Cahya.

Ia menyebut Apindo sangat kecewa bahwa sampai saat ini, teman-teman peker-

ja masih memakal cara-cara memaksa seperti ini, tanpa melihat kondisi dan keadaan ekonomi saat ini. Masih ada puluhan ribu pekerja yang nganggur menunggu kerjaan, disisi lain yang dapat kerjaan malah membuat aksi-aksi meresahkan. Ka-

lau begini caranya, investor mana berani masuk. Tiap tahun bakal ribut lagi masalah UMSK.

Apindo terpaksa akan mengambil langkah-langkah hukum berkaitan dengan penentuan UMSK ini kelak oleh pak gubernur.

"Kami mengambil langkah hukum demi membela nasib pengusaha, demi menciptakan Batam yang bisa berkompetitif dengan negara tetangga, demi menciptakan lapangan kerja untuk para pekerja," katanya.

Dalam pembahasan yang berlangsung alot selama lima jam di kantor Disnaker Kota Batam, Selasa (13/3), disepakati UMS sebesar Rp 3.770.067.

Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam tahun 2018, yang dihadiri unsur Serikat Pekerja, Pengusaha dan Dewan Pengupahan Kota (DPK) bersama Kadisnaker Batam, berlangsung alot. Pembahasan mulai pukul 13.00 hingga pukul

UMSK 2018 = UMSK 2017+ PPNOMOR 78 TAHUN 2015 SEBESAR 8.71 PERSEN

- Sektor (I) Pariwisata, Perhotelan, Garmen (Industri Ringan) sebesar Rp 3.528.537.
- Sektor (II) bagian Elektronik (Industri Menengah) sebesar Rp 3.563.137.
- Sektor (III) bagian galangan kapal dan lainnya (Industri Berat) sebesar Rp 3.770.067.

Rudi-Amsakar Goyang Maumere

BATAM, TRIBUN - Selesai upacara dalam rangka memperingati HUT Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas), anggota satpol dan anggota Damkar menampilkan tarian bersama. Mereka menari didampingi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

"Senang sekali ya mbak, bapak wali kota dan wakilnya mau ikut berjoget dan menari bersama kami," ujar Son salah satu Satpol PP kepada *Tribun*, di

dataran alun-alun engku Puteri Batam Center, Rabu (14/3).

Acara ulang tahun ini juga dibarengi dengan 2 tahun masa pemerintahan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam yang juga diadakan talkshow bersama.

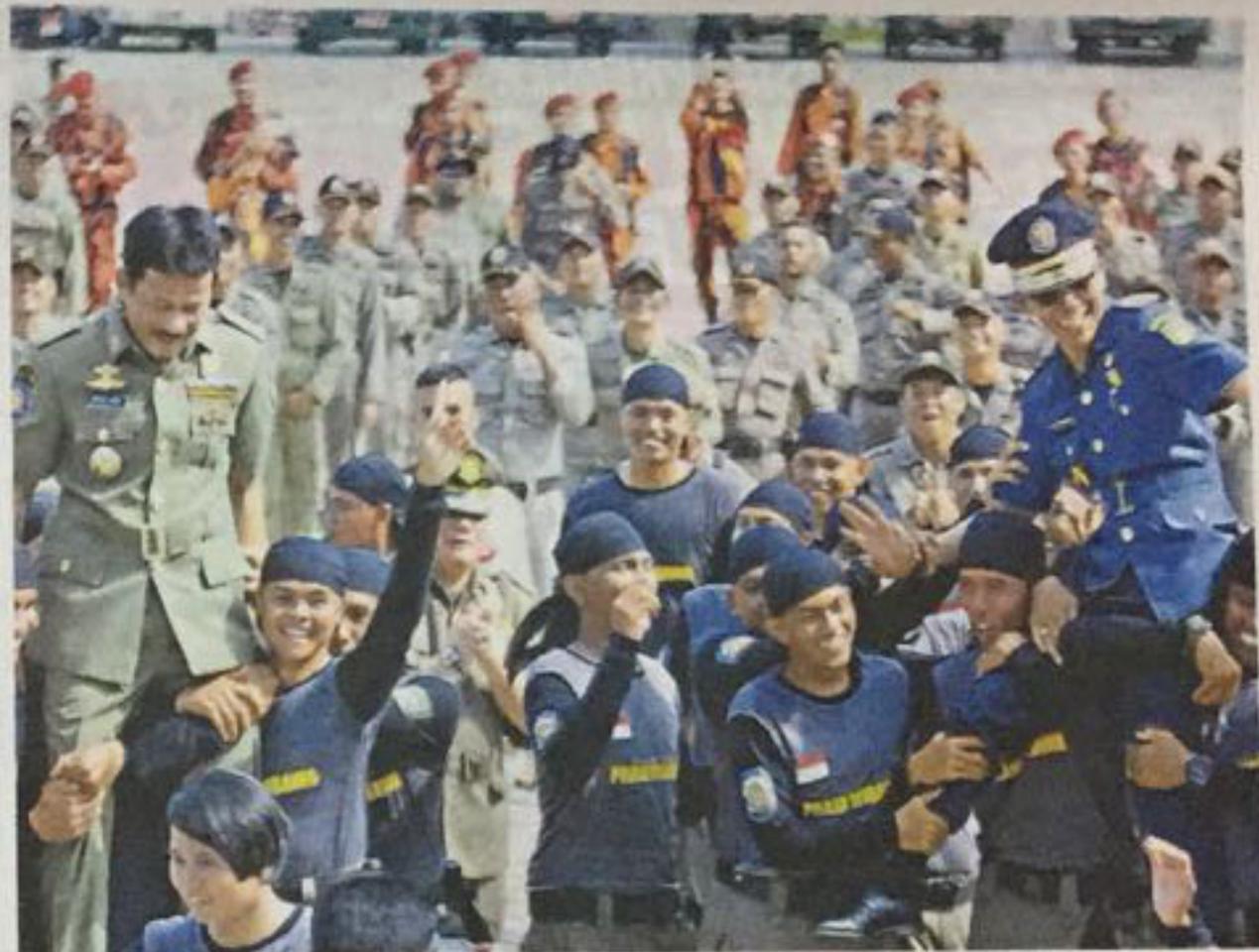
Pantauan *Tribun*, Satpol PP yang menggunakan seragam warna hijau, Linmas seragam warna hijau cerah dan Damkar berwarna biru, sangat antusias bergoyang maumere. Saking menikmati musik di hari yang spesial tersebut, tampak Rudi dan Amsakar diangkat beberapa

Satpol PP sambil bergoyang bersama.

Memang menari tersebut tak menggunakan waktu yang lama. Hanya saja Rudi dan Amsakar terlihat menikmati alunan masak sehingga bergoyang di atas pundak mereka.

"Sudah, sudah turunkan saya. Sudah cukup," ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi setelah beberapa menit bergoyang di atas punggung Satpol PP tersebut.

Sementara Amsakar masih bertahan bergoyang menikmati alunan masak. Kendatipun ia orang kedua diminta turun. **(rus)**



DIANGKAT KE PUNDAK - Usai upacara memperingati HUT Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas), anggota satpol dan anggota Damkar menampilkan tarian bersama Wali Kota Batam Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.



POTONG TUMPENG - Wali kota Batam H. Muhammad Rudi memotong tumpeng usai Upacara HUT Satpol, Linmas dan Damkar sempena 2 Tahun Kepemimpinan Wali kota dan Wakil Wali kota.

2 Tahun Kepemimpinan Rudi-Amsakar

PADA tanggal 14 Maret 2010 pasangan Rudi-Amsakar genap 2 tahun sebagai Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam. Peringatan 2 Tahun Kepemimpinan Rudi-Amsakar disejalankan dengan Upacara Peringatan HUT Satpol PP ke-68, HUT Linmas ke-56 dan HUT Damkar ke-99 Tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri Batam Center, Rabu (14/3).

Setelah pelaksanaan Upacara dilanjutkan de-

ngan program Talkshow Halo Batam Spesial bersama Batam FM yang juga dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Di program ini Pemerintah Kota Batam menerima masukan dan informasi tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ditanggapi langsung oleh Rudi-Amsakar. Acara ini juga dihadiri masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Halo Batam.

Pada siang hari, Wali Kota bersama Wakil dan Sekda Kota Batam bersilaturahmi dengan pimpinan media se-Kota Batam. Pada kesempatan ini Wali Kota memaparkan program dan kebijakan Rudi Amsakar selama memimpin Kota Batam. Rudi Amsakar juga meminta masukan dan kontribusi pemikiran dari pimpinan media untuk kemajuan Batam menuju Bandar Dunia Madani. (*)



MEMIMPIN UPACARA - Wali kota Batam H. Muhammad Rudi menjadi Inspektur Upacara HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar Tingkat Kota Batam.



SAKSIKAN ATRAKSI - Wali kota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah saat menyaksikan penampilan Pasukan huruhara Satpol PP Kota Batam



Percantik Batam Lewat Infrastruktur

► Talkshow 2 Tahun Pemerintahan Rudi-Amsakar

BATAM, TRIBUN - Dalam acara talkshow 2 tahun masa pemerintahan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mereka menyampaikan program yang sudah berjalani selama 2 tahun. Dimana Rudi fokus untuk memperindah Kota Batam.

"Batam harus dibenahi. Saya tak bisa sendiri dan kita sepakat Batam harus diperindah kembali. Kita berikan solusi. Drainase sekaligus kita buat diawal agar 20-30 tahun tak ada masalah. Jalan sekaligus drainase," ujar Wali Kota Batam, Rudi, di gedung Wali Kota Batam Lantai 1.

Talkshow ini berlangsung pukul 09.30 WIB sebelum rapat taksi online dimulai. Ia juga menceritakan pro-

gramnya selama tiga tahun ke depan.

"Hari ini kita berusaha 20 tahun ke depan jalan tak berlubang kembali. Kita tak membongkar jalan yang lama. Sistem jalan hari ini semen beton yang pertama agar berkualitas dan tak bo-

long." tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Amsakar Achmad mengakui harus memulai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

"Pak Wali sudah mulai

● ke halaman 19



TALKSHOW 2 TAHUN - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan program yang sudah berjalani selama 2 tahun. Rudi kini fokus untuk memperindah Kota Batam.

TRIBUN/ROMA

Percantik Batam

membuat rambu-rambu memilih pejabat yang baik. Kalau dimulai dengan input yang benar akan muncul output yang benar," tegas Amsakar.

Amsakar menambahkan tata kelola pemerintahan dimulai dengan non tunai dan e planning, e budgeting. Tak ada lagi tangan-tangan tertentu. Salah satu upaya untuk meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan.

"Ada 421 perizinan yang diurus di mal pelayanan publik dengan melibatkan 30 instansi," katanya.

Dalam talkshow ini, Rudi mengaku telah mengundang Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk mengikuti rapat taksi online. Pantauan *Tribun*, Nurdin datang setelah acara talkshow tersebut berlangsung setengah jam.

Bangun Pipa

Bellavista, Anggrek Mas 1,2 dan 3, Citra Batam, menyusul Perumahan Mediterania,

Nurdin Apresiasi Rudi-Amsakar

Gubernur H Nurdin Basirun mengapresiasi pemerintahan H Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad dalam menakhodai Kota Batam. Dalam upaya memajukan daerah dan memacu pembangunan Rudi Amsakar terus mempercantik kota ini.

"Batam sepanjang dua tahun ini kita lihat, terus berpacu dengan pembangunan. Saya ibaratkan Pemko Batam saat ini kaya tengah bermain sulap. Dari yang dulu infrastruktur sangat minim, sekarang sudah sangat bagus," kata Nurdin saat menjadi nara sumber khusus, bertepatan dengan acara Halo Batam Sepesial Sempena 2 Tahun Kepemimpinan Walikota dan Wakilkota Batam bertempat

di Kota Batam, mayoritas masih mengalir ke waduk. Sebagian lagi ke pantai dan

di Kantor Walikota Batam, Rabu (14/3). Menurut Nurdin, kreatifitas positif dalam memajukan daerah ini harus diapresiasi dengan dukungan penuh semua pihak.

Meski kemajuan Batam sepanjang dua tahun ini sangat dirasakan manfaatnya terutama infrastruktur jalan, menurut Nurdin terkait dengan pertumbuhan ekonomi semua harus mendukung. Kini pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama, tengah diupayakan untuk makin membaik.

Terlebih sambung Nurdin, Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, harus bisa kembali menjadi daerah pusat investasi. Sehingga bila investasi membaik, diharapkan korelasi pertumbuhan ekonomi juga ikut membaik. (* / rus)

Sambungan Hal.13

IPAL bisa diselesaikan pada 2019. Kita akan tambah tim dari lokal dan peralatan yang

7.000 Kendaraan

Riko mengatakan razia yang dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat serta menyadarkan masyarakat untuk membayar tunggakan pajak kendaraan mereka karena dana tersebut akan dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan

Investor Mana

16.51 WIB atau hampir lima jam dengan pengawalan ketat dan juga desakan dari buruh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti menuturkan, rapat yang berlangsung hingga pukul 16.51 WIB, sudah ada kesepakatan dari unsur Pekerja, Pengusaha dan DPK melalui voting, untuk menetapkan UMSK tahun 2018 yang diadakan di Kantor Disnaker Kota Batam, Selasa (13/3).

Rudi menyebut adapun opsi yang diajukan yakni opsi pertama (A) yang ditawarkan pada Sektor I, UMK 2018 tambah satu persen, Sektor II, UMK 2018 tambah

pembangunan.

Riko mengatakan untuk ke depan Dispenda akan memperbanyak mobil Samsat (Samsat bergerak red) untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam membayar pajak. "Jadi ke depan kita akan jemput bola,

tiga persen. Sektor III, UMK 2018 tambah lima persen. Sedangkan Opsi kedua (B) permintaan Serikat pekerja pada, Sektor I: (UMSK 2016 sektor satu tambah Formula PP 78 tahun 2015 ditambah 8.71 persen menjadi Rp 3.528.537. Sektor II: (UMSK 2016 sektor dua ditambah formula PP 78 menjadi Rp3.563.137. Sedangkan sektor III: UMSK 2016 yaitu Formula PP 78 ditambah 8.71 persen Rp3.770.067. Sementara untuk opsi ketiga (C) pembahasan UMSK dikembalikan pembahasannya secara Bipartit. "Dari tiga opsi yang diajukan pada rapat

kita akan membuka pembayaran pajak melalui mobil keliling," kata Riko.

Selama ini animo masyarakat untuk taat membayar pajak masih sangat minim di Batuaji dan Sagulung. "Kemungkinan hal tersebut disebabkan aktivitas masyarakat

tadi dihasilkan opsi B yang berhasil ditetapkan secara voting paling banyak, dengan jumlah yang ditetapkan pada Sektor (I) Rp 3.528.537, Sektor (II) Rp 3.563.137 dan Sektor (III) Rp 3.770.067," jelasnya.

Dia menerangkan, adapun tiga sektor yang sudah ditetapkan, untuk tiap bagiannya, yakni Sektor (I) bagian Pariwisata, Perhotelan, Garmen dan lainnya (industri ringan), Sektor (II) bagian Elektronik (Industri Menengah), Sedangkan Sektor (III) bagian galangan kapal dan lainnya (Industri Berat).

"Inilah bagian-bagian

Sambungan Hal.13

itu yang sangat padat," kata Riko.

Dia mengatakan dari razia yang sudah sering dilakukan banyak pengendara penunggak pajak beralasan tidak sempat melakukan pembayaran karena kesibukan kerja dan lainnya. "kata Riko. (lan)

Sambungan Hal.13

dari tiga sektor yang diajukan," katanya. Dari tiga opsi yang diusulkan dalam rapat sebelumnya, unsur pengusaha dan anggota DPK yang hadir sebanyak 20 orang, paling banyak memilih opsi B dari tiga opsi yang diajukan. "Dalam voting sebanyak 14 orang memilih opsi B. Sementara memilih opsi C sebanyak 2 orang dan abstain empat orang," katanya.

Dia menambahkan, hasil voting saat ini untuk penetapan UMSK tahun 2018. Hasil ini secepatnya akan diserahkan kepada Gubernur Kepri melalui Pemerintah Kota Batam. (* / ais)